

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR : 29



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 545 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI
KOTA BANDUNG TAHUN 2009**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Walikota dilantik;
 - c. bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa akhir jabatan Walikota, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) transisi untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kota Bandung Tahun 2009.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDUNG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI KOTA BANDUNG TAHUN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- c. Walikota adalah Walikota Bandung.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- e. Pembangunan...

- e. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun indeks pembangunan manusia.
- f. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- g. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi yang selanjutnya disingkat RPJMD Transisi adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bandung untuk periode 1 (satu) tahun.
- k. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- l. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- m. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

n. Badan...

- n. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Kota Bandung.
- o. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- p. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kota Bandung Tahun 2009 merupakan dokumen perencanaan daerah Kota Bandung untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan RPJMD Transisi dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum berkaitan dengan dokumen perencanaan jangka menengah.

Pasal 3

RPJMD Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penjabaran dari kesepakatan antara Gubernur Jawa Barat bersama para Bupati dan Walikota se-Jawa Barat tentang Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Barat Tahun 2009 sebagai dasar penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2009.

Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kota Bandung Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :

- (1) Tahun pertama RPJMD Kota Bandung Tahun 2008 - 2013 yang akan ditetapkan setelah Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilantik, dengan mempertimbangkan konsepsi Rencana

Pembangunan...

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025.

- (2) Pelaksanaan kegiatan oleh SKPD dan seluruh komponen pelaku pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Pasal 5

- (1) RPJMD Transisi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAN ANGGARAN

BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : POKOK-POKOK PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci dari RPJMD Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Kepala SKPD melaksanakan program RPJMD Transisi Kota Bandung Tahun 2009 yang dituangkan dalam Renja-SKPD.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2008

Pj. WALIKOTA BANDUNG,



DR. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Ir. Drs. H. TAUFIK RACHMAN, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 073 505

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut pula Rencana Kerja Pembangunan (RKP atau Renja). RKP Daerah Kabupaten/Kota dibuat serta merupakan penjabaran dari RPJM Propinsi dan mengacu kepada RKP Daerah Propinsi. Demikian pula RKP Daerah Propinsi merupakan penjabaran dari RPJM Propinsi dan mengacu pada RKP Nasional. Dokumen RKP/Renja Kota Bandung disusun dan didalamnya memuat rancangan kerja bidang ekonomi Kota Bandung, prioritas pembangunan di Kota Bandung, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan Pemerintah (Pusat/Daerah) maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen perencanaan jangka menengah Kota Bandung yang berlaku saat ini adalah Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2004 - 2008 (Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004) dan akan berakhir pada saat dilantiknnya Walikota Bandung periode 2008-2013. Agar pemerintahan dan pembangunan sejak berakhirnya Renstra tadi tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka pejabat Walikota baru seharusnya sudah mempunyai pedoman yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baru untuk periode tahun 2008-2013. RPJM baru ini tidak mungkin terwujud karena bersamaan dengan waktu pelantikan pejabat Walikota baru, oleh karena itu RPJM tersebut perlu disusun terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 bahwa RPJMD baru ditetapkan dengan peraturan daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Untuk menghindari terjadinya stagnasi berupa kekosongan hukum berkaitan dengan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJMD berakhir sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Dokumen RPJMD Transisi tersebut berisikan program indikatif yang berguna sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) Kota Bandung dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, serta sebagai landasan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2009. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Musrenbang Provinsi dalam rangka penyusunan RKPD Propinsi harus dilaksanakan paling lambat bulan Maret, sehingga musrenbang Kota Bandung paling lambat harus dilaksanakan pada bulan Februari atau awal bulan Maret. Proses penyusunan RKPD/Renja Kota Bandung untuk tahun 2010 harus sudah dimulai sejak Musrenbang Kelurahan pada bulan Januari 2009.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kota Bandung Tahun 2009 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung untuk periode satu tahun yaitu tahun 2009, ditetapkan dengan maksud untuk menghindari stagnasi/kekosongan hukum berkaitan dengan dokumen perencanaan jangka menengah guna memberikan arah sekaligus sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) Kota Bandung dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan bagi pencapaian Visi Kota (Bandung Kota BERMARTABAT).

Adapun tujuan disusunnya Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kota Bandung Tahun 2009 adalah sebagai landasan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung tahun 2009 yang prosesnya dimulai pada awal tahun 2008, dan sebagai pedoman bagi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum Program Indikatif sebagai berikut :

20. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 03);
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08).

1.4 Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kota Bandung Tahun 2009 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Hubungan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi yang berisikan program indikatif Kota Bandung Tahun 2009 ini dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Program Indikatif Kota Bandung Tahun 2009 dibuat dengan memperhatikan RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008 (Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004).
2. Program Indikatif Kota Bandung Tahun 2009, mempertimbangkan asas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Rencana Strategis Kota Bandung Tahun 2004-2008 (Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004).
3. Program Indikatif Kota Bandung Tahun 2009 melihat dan mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2004-2013 (Perda Kota Bandung No. 2 tahun 2004).
4. Program Indikatif Kota Bandung Tahun 2009 merupakan tahun pertama RPJMD Kota Bandung tahun 2009 - 2013, yang akan ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
5. Program Indikatif Kota Bandung Tahun 2009 sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2009 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2009, serta sebagai acuan bagi SKPD dan seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJM Tansisi dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi geografis, kondisi umum demografis dan potensi unggulan daerah Kota Bandung.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAN ANGGARAN

Memuat kondisi ekonomi, tantangan dan prospek ekonomi, arah kebijakan ekonomi dan kebijakan anggaran tahun 2009.

BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat isu strategis, kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan tahun 2009.

BAB V. POKOK-POKOK PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat pokok-pokok program pembangunan daerah tahun 2009 sesuai isu strategis yang akan dipecahkan.

BAB VI. PENUTUP

Memuat penegasan posisi dokumen Program Indikatif Kota Bandung Tahun 2009 dan kaidah pelaksanaannya.

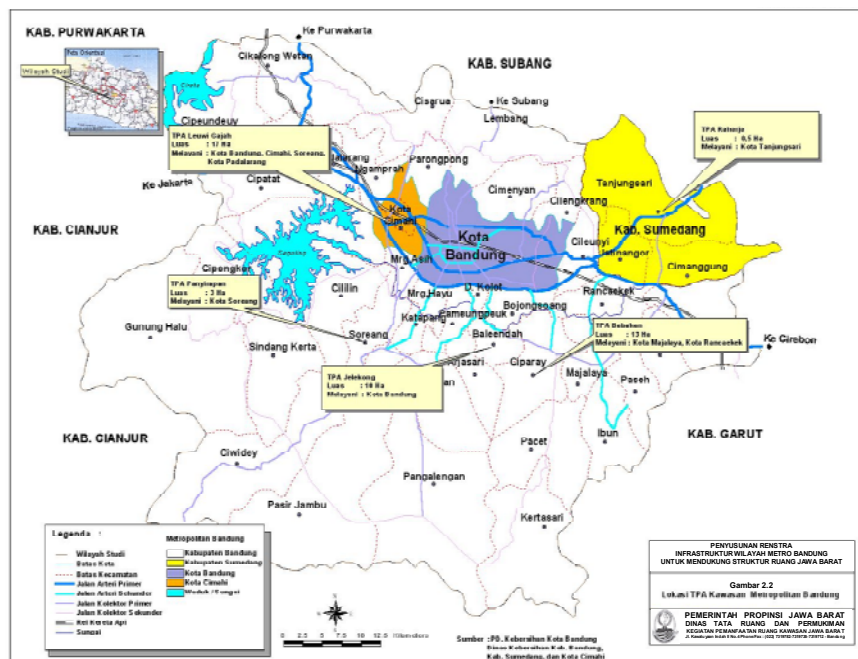
BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografis Daerah

Secara Geografis Kota Bandung terletak di 107° 36' Bujur Timur serta di 6° 55' Lintang Selatan (lihat Gambar 2.1) dengan batas wilayahnya administratif:

Sebelah Utara	: Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung
Sebelah Timur	: Kabupaten Bandung
Sebelah Selatan	: Kabupaten Bandung dengan batas Jalan Tol Padaleunyi
Sebelah Barat	: Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat



Gbr 2.1 PETA KAWASAN METROPOLITAN BANDUNG

Berdasarkan posisi tersebut, maka Kota Bandung berada pada lokasi yang cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi dan potensi perekonomian. Hal tersebut disebabkan Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan utama di Pulau Jawa, yaitu :

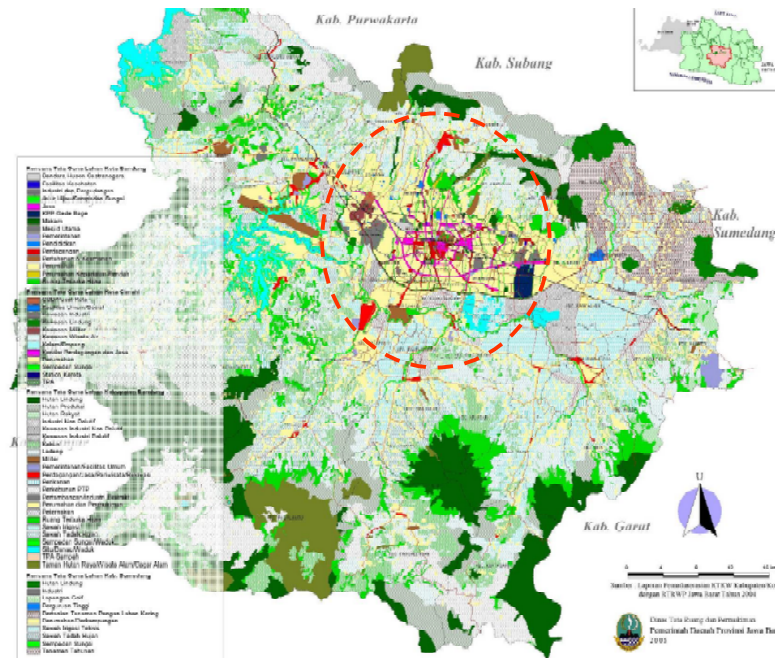
1. Barat - Timur, pada posisi ini Kota Bandung menjadi poros tengah yang menghubungkan antara Ibukota Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah.
2. Utara - Selatan, selain menjadi penghubung utama Kabupaten Subang dengan wilayah Selatan (Pangalengan Kabupaten Bandung), juga menjadi lokasi titik temu antara daerah penghasil perkebunan dengan peternakan dan perikanan.

Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terdiri atas lapisan aluviall hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian Utara umumnya merupakan jenis andosol, sedangkan di bagian Selatan serta Timur terdiri atas sebaran jenis aluviall kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian Tengah dan Barat tersebar jenis tanah andosol.

Iklim asli Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan di sekitarnya, namun pada beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan suhu, hal ini disebabkan polusi dan meningkatnya suhu global di antaranya akibat efek rumah kaca.

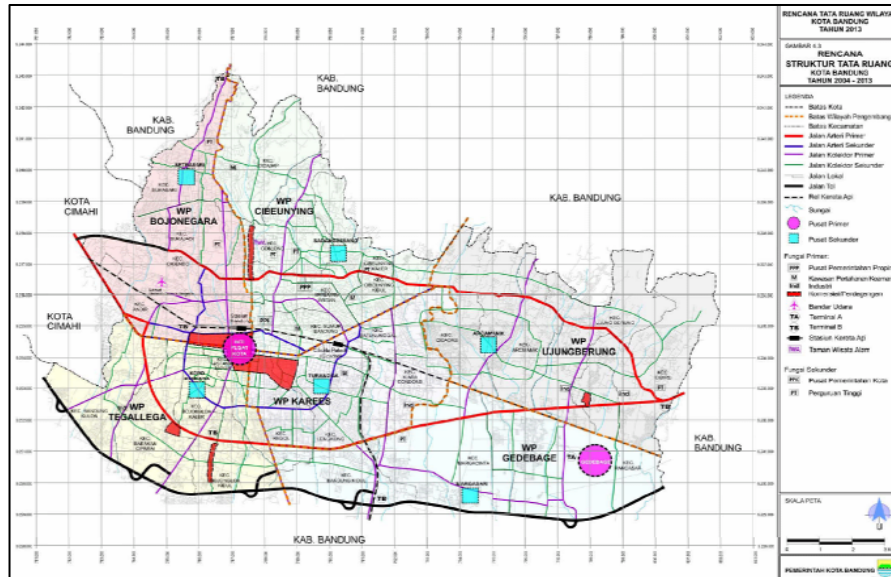
Daerah Kota Bandung terletak pada kawasan cekungan Bandung dan merupakan salah satu daerah yang menjadi bagian Metropolitan Bandung sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.2 Secara empirik hal ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap gambaran umum kondisi Kota Bandung yang bercirikan sebagai kota metropolis yang memiliki potensi geografis, batas administrasi daerah, luas wilayah dan topografis, Demografis, Jumlah Penduduk, Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin, Struktur Usia, Jenis Pekerjaan dan Pendidikan, serta potensi ekonomi Kota Bandung.

BANDUNG METROPOLITAN AREA (BMA)



Gbr.2.2 Area Bandung Metropolitan

Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan, 1.601 RW dan 1.937 RT, mempunyai Luas wilayah 16.729,65 Ha (lihat gambar 2.3). Luas tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.



Gbr 2.3 Wilayah Pemerintahan Kota Bandung

Kota Bandung secara topografis terletak pada ketinggian 791 Meter di atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi berada di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dpl, dan titik terendah berada di sebelah Selatan dengan ketinggian 675 Meter dpl. Di wilayah Kota Bandung bagian Selatan sampai jalur lintasan kereta api, permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara konturnya berbukit-bukit.

2.2. Kondisi Demografis Daerah

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil **Survei Sosial-Ekonomi Daerah (SUSEDA)** Kota Bandung Tahun 2007, jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2006 sebanyak 2.296.848 jiwa, sedangkan tahun 2007 sebanyak 2.329.928 jiwa, dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung tahun 2007 adalah 1,42%.

Secara rinci kondisi penduduk dapat diurai dalam grafik dan tabel berikut :



Tabel 2-1
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung

NO	URAIAN	2006	2007	KENAIKAN/ PENURUNAN
1.	JUMLAH PENDUDUK	2.296.848	2.329.928	1,42%
2.	KOMPOSISI, menurut :			
	a. Jenis Kelamin			
	▪ Pria	1.160.300	1.183.062	
	▪ Wanita	1.136.548	1.146.866	
	b. Usia Kerja	2.018.878	1.971.095	-2,37%
	▪ Angkatan kerja	1.091.494	1.092.117	
	▪ Bukan angkatan kerja	927.384	878.978	
	c. Pendidikan (penduduk usia > 10 th & ijazah tertinggi)	1.867.889	1.971.095	5,53%
	▪ Tidak/belum sekolah & Tidak/belum tamat SD	210.826	183.670	
	▪ SD/MI	488.817	525.862	
	▪ SLTP/MTs & Sederajat	378.415	393.767	
	▪ SLTA & Sederajat	483.596	523.056	
	▪ SMK	118.070	108.072	
	▪ D1/D2	29.520	30.327	
	▪ D3/Sarmud	65.748	68.167	
	▪ D4/Universitas	135.799	132.610	
	▪ S2/S3	20.009	5.564	

*) Angka Sementara, Sumber BPS Kota Bandung.

Dari grafik dan tabel di atas, tergambar bahwa secara kuantitas penduduk Kota Bandung mengalami kenaikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk. Meskipun demikian peningkatan jumlah tersebut tidak sertamerta menunjukkan peningkatan kualitas dari sisi kependudukan, seperti jumlah angkatan kerja mengalami penurunan pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006.

Di sisi lain kenaikan secara kuantitas pada segmen pendidikan tidak secara koheren menunjukkan peningkatan di seluruh unsur pembangun segmen pendidikan, nampak dari penurunan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan SMK, D4/Universitas dan S2/S3 di Kota Bandung. Perbandingan yang cukup mencolok, khusus pada jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan S2/S3 tersebut disebabkan oleh metode sampling yang digunakan oleh pihak BPS Kota Bandung pada tahun 2006 dengan metode sampling tahun 2007 berbeda.

2.3. Potensi Unggulan Daerah

Dalam mendeskripsikan Potensi Unggulan Daerah di Kota Bandung, terdapat beberapa metode yang dipergunakan untuk menilai Lapangan Usaha yang dapat menjadi unggulan, yaitu dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan pola konsumsi dan kemampuan atau kapasitas lapangan usaha dimaksud dalam periode tahun berjalan, selain juga merupakan indikator yang biasa digunakan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan pembangunan suatu daerah baik yang disajikan atas dasar harga berlaku (*current price*) maupun atas dasar harga konstan (*constant price*).

Potensi unggulan Kota Bandung, dihitung berdasarkan kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB terhadap nilai PDRB. Potensi unggulan Kota Bandung terinci dalam tabel berikut :

Tabel 2-2
Kontribusi PDRB Sektor-sektor Unggulan Tahun 2007
(Atas Dasar Harga Konstan) dalam juta Rupiah (Rp) dan Prosentase (%)

LAPANGAN USAHA		2006	%	2007	%
1	Pertanian	69.486.000.000	0,30	68.971.000.000	0,28
2	Industri Pengolahan	7.001.098.000.000	30,38	7.290.943.000.000	29,23
3	Listrik, Gas dan Air Bersih	530.058.000.000	2,30	575.696.000.000	2,31
4	Bangunan/Konstruksi	1.124.841.000.000	4,88	1.218.878.000.000	4,89
5	Perdagangan, Hotel & Restoran	8.285.312.000.000	35,96	9.203.325.000.000	36,90
6	Pengangkutan dan Komunikasi	2.437.372.000.000	10,58	2.772.511.000.000	11,12
7	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.224.107.000.000	5,31	1.302.854.000.000	5,22
8	Jasa-jasa	2.370.830.000.000	10,29	2.508.338.000.000	10,06
TOTAL		23.043.104.000.000	100	24.941.516.000.000	100

Sumber BPS Kota Bandung

*)Angka sementara

**) Terdiri dari sektpr Pertanian, Pertambangan, dan Penggalian, Listrik, Gas, dan Air Bersih, Konstruksi, Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Berdasarkan tabel tersebut yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB Kota Bandung tahun 2007, adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, yang diikuti oleh sektor Industri Pengolahan serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang menunjukkan kontribusi yang secara nominal signifikan terhadap kondisi

perekonomian Kota Bandung, dilihat dari persentase ketiga sektor yang jumlahnya di atas 60%.

a. Potensi unggulan daerah Kota Bandung yang sedang dikembangkan adalah di kawasan :

1. Cihampelas : Sentra Perdagangan Jins
2. Cibaduyut : Sentra Perdagangan Sepatu
3. Cigondewah : Sentra Perdagangan Kain
4. Binong jati : Sentra Kain Rajutan
5. Suci : Sentra Sablon

b. Potensi industri-industri yang ada di Kota Bandung sampai tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Jenis Industri	Nilai Investasi	Jumlah Tahun 2004	Jumlah Tahun 2005	Jumlah Tahun 2006	Jumlah Tahun 2007
Industri Besar	> 1 milyar	9	15	10	12
Industri Menengah	200 jt - 1 milyar	9	15	16	35
Industri Kecil Formal	5 jt - 200 jt	115	138	177	192
Industri Kecil Non Formal	< 5 jt	7.442	8.666	-	-

c. Potensi Perdagangan

Jenis Usaha	Jumlah Tahun 2004	Jumlah Tahun 2005	Jumlah Tahun 2006	Jumlah Tahun 2007*)
Kecil	2.195	2.012	3.656	4.157
Menengah	450	463	1.164	721
Besar	207	76	348	426

*) Sumber: Disindag Kota Bandung

BAB III

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAN ANGGARAN

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2007 dan Prakiraan Tahun 2008

Kinerja perekonomian kota Bandung tahun 2007 hingga saat ini dievaluasi berdasarkan perkembangan indikator makro ekonomi, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Daya Beli (*Purchasing Power Index*), Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Investasi serta Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Perkembangan ekonomi kota Bandung dapat dilihat dari perubahan struktur perekonomian. Gambaran mengenai struktur perekonomian kota Bandung dapat diamati dari kontribusi sektoral masing-masing sektor sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1. Struktur perekonomian kota Bandung dibangun oleh sektor tersier dengan kontribusi sebesar 64%, sektor sekunder sebesar 35% dan Sektor Primer sebesar 1%, yang berdampak terhadap meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat rata-rata 20% per tahun.

Perekonomian kota Bandung pada dasarnya didukung oleh dua sektor utama, yaitu sektor perdagangan dan industri pengolahan. Selama kurun waktu 2006 - 2008, kedua sektor tersebut memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap total PDRB Kota Bandung. Sub sektor pedagang besar dan eceran mendominasi struktur ekonomi sektor perdagangan, hal ini sejalan dengan karakteristik Kota Bandung sebagai Kota *Collective* dan *Distributive* barang-barang produksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menunjang dan meningkatkan efisiensi kinerja sektor pendukung utama dalam perekonomian kota Bandung, peran sektor listrik, gas dan air bersih yang mengindikasikan aktivasi suatu kegiatan serta sektor keuangan sebagai salah satu alternatif sumber

pembiayaan sangat diperlukan, hal ini sesuai dengan data kontribusi sektor-sektor tersebut yang mengalami peningkatan.

Kontribusi sektor menggambarkan perubahan struktur perekonomian dalam kurun waktu tertentu, secara terinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1: Perubahan Struktur Perekonomian Kota Bandung Berdasarkan PDRB (Harga Konstan 2000) 2005 s/d 2008 Dlm Juta Rp

No.	LAPANGAN USAHA	2005	2006	2007	2008**
1	2	3	4	5	6
1.	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	70.753	69.486	67.342	94.306
2.	PERTAMBANGAN DAN HASIL-HASILNYA	0	0	0	0
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	6.591.750	7.001.098	6.886.353	7.894.883
4.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	483.050	530.058	578.643	613.564
5.	BANGUNAN/KONSTRUKSI	1.041.713	1.124.841	1.069.910	1.237.987
6.	PERDAGANGAN	7.485.738	8.285.312	9.587.518	9.675.846
7.	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	2.243.774	2.437.372	3.177.549	3.252.431
8.	KEUANGAN, PERSEWAHAN DAN JASA PERUSAHAAN	1.198.275	1.224.107	1.299.453	1.512.190
9.	JASA-JASA	2.255.643	2.370.830	2.272.172	2.869.632
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	21.370.696	23.043.104	24.941.516	27.148.840

Sumber : BPS Kota Bandung

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS dengan metode sampling, pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung dapat dilihat dengan membandingkan perubahan indikator pokok angka-angka dan indeks-indeks pembentuk/komposit besaran yang menjadi dasar penetapan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2006 dengan indeks komposit capaian tahun 2007.

Berdasarkan data BPS yang diperoleh dari hasil Pendataan Survei Sosial-Ekonomi Daerah (SUSEDA) Kota Bandung 2007, diperoleh informasi sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perkembangan Nilai Indikator Makro dan Indeks Komposit Kota
Bandung
Tahun 2006-2007

NO	INDIKATOR	SATUAN	2006	2007 *)	PENINGKATAN/ PENURUNAN (%)
1.	IPM	-	77,51	78,09	0,75
2.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,57	73,39	1,13
3.	Angka Melek Huruf (AMH)	Persen	99,32	99,44	0,12
4.	Standar Hidup Layak Konsumsi per Kapita yang disesuaikan	Ribu Rp	576,89	577,127	0,04
5.	Indeks Daya Beli	-	63,99	64,04	0,08
6.	Indeks Pengetahuan	-	89,26	89,60	0,34
7.	Indeks Peluang Hidup	-	79,28	80,64	1,36
8.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,37	10,49	1,16
9.	LPE (Konstan)	Persen	7,83	8,24	5,24
10.	LPE (Berlaku)	Persen	25,00	17,98	(28,08)
11.	PDRB (Berlaku)	Juta Rp	43.491.380	51.312.181	17,98
12.	PDRB per Kapita (Berlaku)	Juta Rp	19.352.441	22.644.447	17,01
13.	PDRB (Konstan)	Juta Rp	23.043.104	24.841.518	7,80
14.	PDRB per Kapita (Konstan)	Juta Rp	10.253.533	11.006.077	7,34
15.	Jumlah Investasi	Juta Rp	4.181.030.498.773	5.405.271.206.138	29,28
16.	Inflasi	Persen	5,33	5,21	(0,12)

*) Angka Sementara, Sumber BPS Kota Bandung.

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan makro ekonomi kota Bandung pada tahun 2007 semakin menunjukkan

perkembangan yang cukup signifikan yang berdampak pada semakin membaiknya kondisi pendidikan dan kesehatan masyarakat kota Bandung.

Adapun penjelasan singkat data-data tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) PDRB Kota Bandung pada tahun 2007 (atas dasar harga Berlaku) sebesar Rp 51.312.181, sedangkan pada tahun 2006 sebesar Rp 43.491.380, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 7.820.801 atau 17,98 %. Hal ini mengindikasikan bahwa secara agregat kinerja perekonomian Kota Bandung mengalami peningkatan signifikan, adapun peningkatan tersebut merupakan kontribusi dominan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta industri pengolahan.
- 2) Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE tahun 2007 (atas dasar harga Konstan) sebesar 8,24%, sedangkan pada tahun 2006 sebesar 7,83% berarti mengalami kenaikan sebesar 0,41 %. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa tingkat investasi sebesar Rp 5.405.271.206.138,-memberikan dampak terhadap pergerakan sektor riil.
- 3) Inflasi Kota Bandung pada tahun 2007 sebesar 5,21%, sedangkan pada tahun 2006 sebesar 5,33% berarti menunjukkan penurunan sebesar 0,12%. Penurunan tingkat inflasi akan sangat berdampak terhadap iklim berusaha dan berinvestasi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- 4) Indeks Daya Beli pada tahun 2007 sebesar 64,04 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan Indeks Daya Beli tahun 2006 sebesar 63,99, yang berarti terdapat peningkatan pola konsumsi dan perbaikan kemampuan untuk membelanjakan kebutuhan mendasar sebesar 0,08%.
- 5) Dari informasi tersebut di atas, yang menjadi indeks komposit dari Indikator Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh hasil perhitungan yang menunjukkan adanya kenaikan IPM, dari tahun 2006 sebesar

77,51 menjadi 78,09 pada tahun 2007, atau kenaikan sebesar 1,58. Berdasarkan data dimaksud mengindikasikan terjadinya perubahan berupa peningkatan pembangunan di sektor kesehatan masyarakat, perekonomian-kesejahteraan masyarakat dan pendidikan masyarakat Kota Bandung.

Secara keseluruhan berdasarkan pada data indikator makro seperti terjadinya peningkatan PDRB, LPE, IDB yang diiringi dengan penurunan tingkat inflasi, hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian kinerja perekonomian Kota Bandung tidak bersifat semu. Artinya bahwa investasi yang terjadi (baik yang bersifat perbaikan sarana prasarana maupun peningkatan terhadap kapasitas produksi) terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran serta industri pengolahan mampu meningkatkan pergerakan sektor riil yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Tetapi ternyata peningkatan tersebut tidak serta-merta berdampak terhadap pengurangan tingkat pengangguran kota, hal ini dikarenakan dari sisi permintaan, serapan tenaga kerja pada sektor perdagangan, hotel dan restoran tidak setinggi pada sektor industri pengolahan. Di lain pihak dalam hal sisi penawaran tenaga kerja, kualifikasi SDM yang tersedia di Kota Bandung tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja (indikasi : tingkat kelulusan SMK yang nota bene merupakan umur produktif yang siap pakai mengalami penurunan).

Kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Bandung (atas dasar harga konstan) dalam kurun waktu 2005-2008 menunjukkan peningkatan meskipun peningkatan tersebut masih berada dalam kisaran di bawah 1 (satu) digit. Tahun 2005 LPE Kota Bandung mencapai 7.53%, meningkat menjadi 7.83% pada tahun 2006, selanjutnya menjadi 8.24% pada tahun 2007 (angka sementara), terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2008 diprediksikan mencapai 8,85%. LPE Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan LPE nasional dan LPE Jawa Barat.

Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Bandung relatif mampu menekan *eksternalitas negatif* yang dapat mereduksi pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tersebut. Kenaikan inflasi mencapai 19,56% pada tahun 2005 tidak mempengaruhi peningkatan LPE kota Bandung. Hal ini juga menunjukkan bahwa kinerja perekonomian kota Bandung mampu menekan eksternalitas negatif yang disebabkan oleh kenaikan inflasi.

Jika dilihat dari peningkatan **indeks daya beli** dari tahun ke tahun memperlihatkan peningkatan, yaitu pada tahun 2005 sebesar 63,93% meningkat menjadi 63,99% pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 meningkat lagi menjadi 64,04%, pengendalian **inflasi** pada tahun 2005 sebesar 19,56% sedangkan pada tahun 2007 hanya sebesar 5,21%, sehingga terjadi penurunan angka **pengangguran**, Yaitu pada tahun 2005 sebesar 175.337 jiwa menjadi 174.067 jiwa pada tahun 2007, dan diprediksikan sebanyak 173.074 jiwa pada tahun 2008. Namun demikian penurunan angka pengangguran tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh dominasi sektor Jasa (sektor tersier) pada pembentukan PDRB kota Bandung memiliki karakter lebih sedikit menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor produksi. Sektor produksi yang menyerap banyak tenaga kerja mengalami berbagai kesulitan, seperti kenaikan harga bahan baku, kenaikan Tarif Dasar Listrik, kenaikan Upah Minimum Kota, kenaikan BBM, tidak Bankable, tingkat suku bunga kredit investasi masih tinggi dan sebagainya.

Hal ini juga diperkuat oleh data **investasi** yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dimana pada tahun 2006 kredit konsumsi (Rp. 10,8 trilyun) dan modal kerja (Rp. 6,7 trilyun) lebih besar dari pada kredit investasi (Rp. 5 trilyun). Jika dicermati pertumbuhan besarnya investasi, ternyata pada tahun 2006 Kota Bandung hanya mampu menyerap 5,5 % dari total investasi yang masuk ke Propinsi Jawa Barat. Namun demikian, tingkat investasi/belanja (riil) di Kota Bandung sebetulnya jauh lebih besar dari angka ini mengingat sebagian besar investasi yang masuk ke

Kota Bandung adalah investasi dalam bentuk modal kerja, sehingga tidak tercatat secara resmi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung.

Pada Tahun 2008 kondisi perekonomian kota Bandung menunjukkan perkembangan yang cukup baik seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Bandung
Tahun 2005-2008**

	Indikator Makro	Satuan	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008**	Tahun 2009***
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDRB (harga berlaku)	Juta Rp.	34.792.184	43.491.380	51.312.181	61.152.569	74.471.599
2	PDRB (harga konstan)	Juta Rp.	21.370.696	23.043.104	24.941.516	27.148.840	29.684.542
3	LPE	%	7,53	7,83	8,24	8,85	9,34
4	Tingkat Inflasi	%	19,56	5,33	5,21	7,60	8,13
5	Struktur PDRB (pendekatan produk / Sektoral):						
	▪ Pertanian, Pernakan, Kehutanan dan Perikanan	%	0,33	0,30	0,27	0,34	0,31
	▪ Pertambangan dan Hasil-2 nya	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	▪ Industri Pengolahan	%	30,84	30,38	27,61	29,08	28,34
	▪ Listrik, Gas dan Air Bersih	%	2,26	2,30	2,32	2,26	2,29
	▪ Bangunan / Konstruksi	%	4,87	4,88	4,29	4,56	4,42
		%	35,03	35,96	38,44	35,64	37,04
	▪ Perdagangan	%	10,50	10,58	12,74	11,98	12,36
	▪ Pengangkutan dan						

	Komunikasi						
	▪ Keuangan, Persewahan dan Jasa Perusahaan	%	5,61	5,31	5,21	5,57	5,39
	▪ Jasa-Jasa	%	10,55	10,2	9,11	10,57	9,84
6	Produktivitas Pekerja (harga berlaku)	Rp.	38.492.933	47.487.447	55.041.946	65.167.503	77.687.342
7	Produktivitas Pekerja (harga konstan)	Rp.	23.643.838	25.160.346	26.754.458	28.814.333	30.966.345
	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	1.078.196	1.091.494	1.106.305	1.117.700	1.130.777
	Jumlah Bekerja	Orang	903.859	915.850	932.238	944.629	958.607
	Jumlah Pengangguran	Orang	175.337	175.644	174.067	173.074	172.171
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	16,25	16,09	15,73	15,48	15,23
	Jumlah Penduduk Miskin	Rmt	70.419	84.287	83.500	82.606	81.783
	Pendapatan Perkapita :						
	- PDRB perkapita (harga berlaku)	Rp.	15.789.552	19.352.441	22.616.531	24.794.604	32.214.591
	- PDRB perkapita	Rp.	9.698.550	10.253.533	10.993.307	11.930.573	12.840.807

	(harga konstan)						
	Investasi	Rp.	3.658.812,95	4.181.030,50	5.405.271,21	5.883.637,71	6.433.169,47
	Indeks Pembangunan Manusia	%	77,42	77,51	78,09	78,33	78,47
	- Indeks Daya Beli	%	63,93	63,99	64,04	64,27	64,40
	- Indeks Kesehatan	%	79,27	79,28	80,64	80,97	81,23
	- Indeks Pendidikan	%	89,06	89,26	89,60	89,70	89,78

Sumber : BPS Kota Bandung

Keterangan : ** Angka Sementara

*** Angka Prediksi

Pembangunan ekonomi suatu daerah sangat tergantung pada besarnya **anggaran daerah** yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas yang mendukung pembangunan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum anggaran yang dimaksud dari tahun ke tahun masih terbatas. Besarnya anggaran pendapatan daerah sangat menentukan besarnya alokasi ini.

Kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunannya dapat diukur dari potensi PAD-nya. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang berada dalam wilayah administrasi daerah yang bersangkutan. Sumber PAD kota Bandung umumnya berasal dari penerimaan pajak daerah. Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan PP Nomor 65 Tahun 2001, jenis-jenis pajak daerah kota Bandung adalah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir serta jenis pungutan pajak baru yaitu Pajak Rumah Kost.

Realisasi penerimaan pajak daerah kota Bandung secara agregat mengalami *overtarget*. Target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 137,050 milyar dapat direalisasikan sebesar Rp. 143,107 milyar atau mencapai 104,42% dari target, sedangkan pada tahun 2007 pencapaian realisasi pajak adalah sebesar 102,06%, dengan demikian mengalami sedikit penurunan. Dalam tahun 2005, penerimaan pajak daerah kota Bandung masih didominasi oleh jenis Pajak Hotel, Restoran dan Penerangan Jalan, yaitu sebesar 79,93% dari total penerimaan pajak dan pada tahun 2007 sebesar 77,14%. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penetapan target penerimaan pajak daerah perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan hasil kajian studi potensi PAD Kota Bandung.

Perkembangan APBD dari tahun 2006 hingga tahun 2008 serta prediksi pertumbuhannya pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Sumber-Sumber Pendanaan Dari APBD Kota Bandung

No.	Pos APBD	Tahun Anggaran			
		2006*	2007*	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Daerah	1.397.157.248.711	1.685.863.568.025	1.866.251.039.225	1.871.696.152.000
	a.PAD	255.300.008.176	287.474.223.177	327.508.555.275	335.686.949.000
	b.Pendapatan Transfer				
	- Dana Perimbangan	1.139.842.617.028	1.099.621.320.720	1.245.945.050.000	1.295.573.189.000
	- Transfer Pemerintah Pusat lainnya				
	- Lain-Lain Pendapatan	2.014.623.507	298.768.024.128	292.797.433.950	240.436.014.000
2.	Belanja Daerah		1.500.139.178.005	2.145.988.346.663	1.871.696.152.000
	a. Belanja Tidak Langsung	-	900.549.881.760	1.237.199.489.722	1.223.859.152.000
	b. Belanja Langsung	-	599.589.296.245	908.788.856.941	647.837.000.000
3.	Surplus (+) / Defisit (-)	-	185.724.390.020	(279.737.307.438)	
4.	Pembiayaan Daerah	65.453.863.999	165.615.355.786	279.737.307.438	
	a. Penerimaan Pembiayaan	89.682.606.690	195.910.243.034	296.965.938.196	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	24.228.742.691	30.294.887.248	17.228.630.768	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah di perkirakan tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp. 250.108.439.017,64 (15,48%) dibandingkan pada tahun 2007, dengan masing-masing sumber penerimaan yang meningkat pula yaitu : PAD meningkat sebesar Rp. 45.526.972.536,00 (16,15%), Dana Perimbangan meningkat Rp. 191.347.880.325,00 (18,14%) dan lain-lain Pendapatan yang sah meningkat sebesar Rp. 13.233.586.156,58 (47,34%). Demikian pula pada sisi Belanja Daerah mengalami kenaikan pula, pada tahun 2007 besarnya Belanja Daerah adalah Rp. 1.786.806.337.918,35 menjadi Rp. 2.145.988.346.663,00 pada tahun 2008 atau meningkat sebesar Rp. 359.182.008.744,65 (20,10%). Kenaikan belanja terutama terjadi pada Belanja Langsung yaitu sebesar 22,55% dibanding tahun 2007, yang disebabkan oleh meningkatnya Belanja Program / Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pembiayaan Daerah tahun 2008 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 109.073.569.727,80. Hal ini disebabkan silva yang tinggi pula sehingga kedepan diperlukan upaya yang lebih terarah dalam perencanaan anggaran.

3.3.1 Dana Desentralisasi / APBD, Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

Perkembangan besarnya dana desentralisasi (APBD) kota Bandung telah diuraikan secara rinci di muka. Adapun perkembangan dana dekonsentrasi (APBN) yang dilaksanakan di Kota Bandung, sehubungan dengan keterbatasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum dapat disajikan dalam pembahasan kali ini, sedangkan untuk dana tugas pembantuan sampai dengan tahun 2008, Total Penerimaan Pemerintah Kota Bandung menerima sebesar Rp. 5.147.482.000,00 yaitu pada tahun 2007 sebesar Rp. 4.440.590.000,00 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 706.892.000,00.

No	Dana	2006	2007	2008
1.	Desentralisasi		1.500.139.178.005	2.145.988.346.663

Sumber: Bappeda Kota Bandung 2008

Besarnya dana ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

3.3.2 Dana Dekonsentrasi / APBN

Dana APBN Dekonsentrasi yang dialokasikan pada instansi vertikal yang berada di wilayah kota Bandung adalah sebagai berikut.:

No	Dana	2006	2007	2008
1	Dekonsentrasi	2 ,700,793,317,000	2,541,514,956,000	2,700,793,317,000

Sumber: Bappeda Propinsi Jawa Barat 2008

Besarnya dana dekonsentrasi mengalami penurunan sebesar Rp. 159.278.361.000,- (5,9 %) pada tahun 2007 dan diharapkan pada tahun 2008 tidak mengalami penurunan, minimal sama dengan angka tahun 2007 atau meningkat menjadi Rp. 2.700.793.317.000,- (seperti pada tahun 2006). Dana dekonsentrasi seluruhnya dialokasikan tersebar pada berbagai instansi vertikal di wilayah kota Bandung. Berdasarkan asumsi pertumbuhan rata-rata 5,9 %, maka pada tahun 2009 dana dekonsentrasi / APBN akan meningkat menjadi Rp. 2.860.140.122.703,- (tahun 2009), selanjutnya meningkat lagi menjadi Rp. 3.028.888.389.942,- (tahun 2010).

3.3.3 Dana Tugas Pembantuan / APBN

Besarnya dana tugas pembantuan dari tahun 2006 hingga tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Dana	2006	2007	2008
1	Tugas Pembantuan		4,440,590,000	706,892,000

Sumber: Bappeda Propinsi Jawa Barat 2008

Besarnya dana ini mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2008, kemungkinan disebabkan oleh belum terhitung seluruhnya (masih angka sementara).

3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah daerah diharapkan berperan sebagai fasilitator bukan sebagai pelaku ekonomi. Dalam peningkatan akses permodalan bagi UMKM, pemerintah daerah bukan sebagai lembaga keuangan yang setiap tahun memberikan bantuan permodalan, melainkan sebagai fasilitator yang menghubungkan UMKM dengan Lembaga Pemberi Bantuan. Pemerintah daerah diharapkan memiliki respon yang tinggi terhadap potensi perekonomian dan permasalahan pembangunan di wilayahnya, sehingga usulan-usulan kegiatan dari bawah disusun berdasarkan pertimbangan potensi dan permasalahan tersebut.

Pemerintah daerah juga diharapkan paling tidak memiliki pengetahuan wirausaha agar peka dalam mencermati permasalahan dan perkembangan ekonomi di daerahnya sehingga usulan-usulan kegiatan tidak didominasi oleh kegiatan yang bersifat *cost centre* melainkan kegiatan yang dapat memberikan multiplier efek terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Pengelolaan BUMD dilakukan secara profesional dengan menempatkan personil yang memiliki kemampuan dan jiwa wirausaha sebagai direktur BUMD dan fungsi-fungsi lainnya.

Pemerintah Kota Bandung menetapkan tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kota Bandung 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat kota Bandung yang Bermartabat yaitu masyarakat kota yang

dapat dijadikan teladan karena kebersihan, ketertiban, keamanan, kemakmuran, ketaatan, keadilan, dan ketaqwaannya.

Sebagai ukuran tercapainya Kota Bandung Bermartabat dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran- sasaran pokok sebagai berikut :

A. Terwujudnya perekonomian kota yang berdaya saing, ditandai oleh hal-hal berikut :

1. Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, berdaya saing serta sehat dan berkeadilan;
2. Terwujudnya Usaha Mikro Kecil Menengah -Koperasi yang lebih tangguh dan mandiri;
3. Terwujudnya Pariwisata yang berkelanjutan;
4. Terwujudnya Kerjasama dan koordinasi yang menguntungkan dengan wilayah sekitar Kota Bandung (Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Garut dan Kab. Sumedang);

B. Terwujudnya sistem pembiayaan kota terpadu.

1. Terwujudnya kapasitas anggaran pemerintah yang optimal;
2. Terwujudnya Peran serta aktif Masyarakat dan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan kota;

Dalam Misi Kota Bandung yang kedua dicantumkan Misi untuk Mengembangkan Perekonomian Kota yang Adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Misi ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap peningkatan kegiatan ekonomi akan berpengaruh pada peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang pada gilirannya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Maknanya bahwa setiap potensi ekonomi yang dimiliki harus dimanfaatkan secara optimal dengan

memperhatikan peluang-peluang yang ada guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi kota yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Adapun sasaran dari Misi ini adalah:

- a. Meningkatnya aktivitas usaha kecil, menengah dan besar di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Meningkatnya aktivitas usaha perkoperasian;
- c. Meningkatnya penanaman modal/investasi;
- d. Meningkatnya aktivitas usaha kepariwisataan;
- e. Meningkatnya aktivitas penyediaan komoditas hasil-hasil pertanian yang berkualitas.

Mengacu pada Raperda tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJP) kota Bandung 2005-2025, prinsip dasar pengembangan ekonomi kota Bandung dalam jangka menengah I (2005-2009) berbasis pada:

- a. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan riil per-kapita melalui penciptaan akselerasi pembangunan sektor inti (*Core Sectors*);
- b. Peningkatan skala dan skop ekonomi dengan menumbuhkan keterkaitan dan jaringan;
- c. Menumbuhkan kreatifitas para pelaku usaha dan masyarakat luas berbasis inovasi untuk ditindak-lanjuti dengan komersialisasi yang didukung oleh investasi;
- d. Menumbuhkan budaya yang mendukung produktivitas, efisiensi dan pembentukan modal sosial;
- e. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan;
- f. Pembangunan daya dukung infrastruktur berbasis ekonomi kreatif dan ekonomi Teknologi Informasi;

- g. Pembangunan ekonomi berbasis *self-sustain* (kemandirian) dan berwawasan lingkungan.

Core Sectors yang merupakan faktor pengungkit perekonomian kota Bandung diidentifikasi berdasarkan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB dan penciptaan lapangan kerja di kota Bandung, meliputi; Sektor Perdagangan, Sektor Pariwisata serta Sektor Hotel dan Restoran.

Perkembangan perekonomian kota Bandung baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang ada di lingkungan internal maupun eksternal-nya. Lingkungan internal lebih dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian kota Bandung sedangkan lingkungan eksternal dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian propinsi Jawa Barat, nasional serta internasional.

Berdasarkan hasil pemetaan, ada 8 sektor penggerak ekonomi utama di Kota Bandung, yaitu Perdagangan Besar, Hotel, Restoran, Angkutan Darat, komunikasi, Makanan, Tekstil dan Barang Cetak. Untuk meningkatkan perekonomian Kota Bandung khususnya dalam hal peningkatan daya saing kota maka upaya-upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Memperbaiki Live Ability :
 - a. Biaya Hidup
 - b. Fasilitas Umum dan Layanan Publik
 - c. Menekan Tingkat Kriminalitas
 - d. Menciptakan Lingkungan yang aman
2. Memperbaiki Investability
 - a. Tenaga Kerja Trampil
 - b. Infrastruktur dan Fasilitas Produksi
 - c. Sistem Birokrasi dan Regulasi yang Kondusif
3. Visitability
 - a. Menyediakan fasilitas transportasi dan akomodasi yang kompetitif
 - b. Revitalisasi Infrastruktur Pariwisata

- c. Membangun Kemudahan
- d. Menciptakan Suasana Nyaman dan Aman
- e. Akses Ke Pusat Bisnis Global

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi internal dan eksternal daerah tersebut maka strategi yang akan dilakukan dalam pembangunan ekonomi kota Bandung tahun 2009 adalah:

- a. Memberdayakan komunitas kreatif melalui fasilitasi kebutuhan baik infrastruktur maupun suprastruktur pendukung dalam mewujudkan Bandung sebagai Kota Kreatif Yang Bermartabat;
- b. Mengembangkan potensi produk ekspor ke USA melalui penelusuran jenis produk yang diminati serta pengembangannya sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- c. Memanfaatkan brand image, aksesibilitas serta potensi pasar kota Bandung melalui pengembangan kewirausahaan;
- d. Memanfaatkan potensi ekonomi keberadaan Kampung Asia Afrika, khususnya yang berkaitan dengan potensi perdagangan luar negeri;
- e. Mengevaluasi serta menata kembali upaya pengembangan lima kawasan dengan mempertimbangkan hasil kajian yang telah dilakukan serta kebijakan pusat dan propinsi;
- f. Mempermudah dan meningkatkan pelayanan untuk dunia usaha sehingga Mendorong dunia usaha untuk lebih efisien dan menghasilkan produk;
- g. Memfasilitasi kebutuhan permodalan Koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan potensi NPL UMKM serta perkembangan fungsi intermediasi perbankan;
- h. Meningkatkan daya saing pasar tradisional serta mengatur mata rantai distribusi barang dagangan dan operasional serta jenis barang dagangan antara pasar tradisional dan pasar modern;

- i. Mendorong sektor keuangan bank , non bank dan koperasi untuk membantu produk-produk unggulan kota Bandung yang mendukung terhadap sektor jasa;
- j. Mengembangkan keamanan, kenyamanan dan kelengkapan infrastruktur di lokasi wisata;
- k. Memperbaiki stabilitas harga, distribusi barang kebutuhan pokok serta upaya perlindungan konsumen;
- l. Memperkuat ketahanan pangan melalui kerjasama pembinaan dengan pemerintah daerah wilayah asal bahan pangan tersebut;
- m. Meningkatkan kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara profesional melalui restrukturisasi fungsi dan kelembagaan.

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah kota Bandung diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Untuk maksud tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan adalah:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi Sumber PAD melalui; (1) Upaya ekstensifikasi objek pajak yang sesuai dengan ketentuan Perda namun belum teridentifikasi (objek pajak potensial yang belum terdaftar). Berdasarkan hasil kajian Kantor Litbang dan UNPAD, tahun 2007, terdapat 10.992 objek pajak pada jenis pajak Parkir, Rumah Kost, Tempat Hiburan dan Reklame senilai Rp.70.884.505.390,-, (2) Upaya intensifikasi objek pajak yang telah terdaftar namun belum memberikan nilai pembayaran sesuai ketentuan Perda (*undervalue*). Dari 1805 objek pajak yang terdaftar, besarnya pajak yang dipungut berada dibawah ketentuan perumusa sesuai Perda dengan selisih nilai Rp.67.610.289.435,-.

- b. Pemantapan kelembagaan, kemampuan SDM serta Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan, khususnya pelayanan yang dipungut retribusinya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- d. Meningkatkan kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah secara profesional melalui restrukturisasi fungsi dan kelembagaan;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam perolehan dana perimbangan.

Upaya optimalisasi sumber pendapatan dari dana perimbangan, dilakukan melalui peningkatan akurasi penghitungan kebutuhan daerah (jumlah penduduk, penduduk miskin, luas wilayah dan kondisi geografis) serta potensi daerah (PDRB, Bagi Hasil Pajak, Pajak Orang Pribadi) yang menentukan besarnya *fiscal gap* (selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah) dimana hal ini menjadi dasar perhitungan dalam alokasi dana perimbangan.

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun 2009.

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Sumber penerimaan daerah berasal dari surplus Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (2007) dan tahun berjalan (2008), transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, penyertaan

modal, pembayaran transfer ke dana cadangan serta pembayaran defisit Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (2007).

Kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2009 diarahkan pada pembayaran pokok pinjaman daerah yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah pada sektor / kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pembentukan dana cadangan serta pembayaran defisit Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu (2008) jika terjadi defisit anggaran.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA

Pembangunan Kota sebagai sebuah definisi sendiri, memberikan pengertian akan adanya suatu usaha yang berkesinambungan untuk meningkatkan wilayah kota menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Karena adanya upaya berkelanjutan dalam kegiatan yang melibatkan manusia sebagai salah satu bagian utama, maka diperlukan strategi dalam pembangunan kota. Strategi tersebut diperlukan dalam upaya meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh setiap kegiatan pembangunan di Kota Bandung, baik dampak sosial, ekonomi, maupun dampak psikologis.

Hal yang perlu dicermati dalam penetapan strategi pembangunan daerah, adalah permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan sebelumnya. Keberanian Pemerintah Kota Bandung dalam mengevaluasi hasil-hasil kegiatan pembangunan dengan penilaian minor adalah sebuah langkah penting dalam penetapan strategi pembangunan yang tepat untuk Kota Bandung.

Gambaran pelaksanaan pembangunan kota pada Bab III memberikan ilustrasi singkat, bahwa masih ada pekerjaan pemerintah yang belum tuntas, seperti target LPE 11 % yang sama sekali tidak tercapai, kualitas dan ketersediaan infrastruktur kota yang carut marut, Masih adanya siswa yang gagal lulus SMA, Fasilitas kesehatan yang masih rendah, dan ketidakjelasan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah secara matang direncanakan.

Dengan melihat ketidaktuntasan tersebut, maka diperlukan sebuah rekonstruksi strategi pembangunan kota dalam suatu kerangka berpikir mengakar yang mengelaborasi, antara lain: penetapan isu strategis sebagai hasil penyerapan informasi permasalahan yang belum tuntas baik Bandung sebagai Kota inti maupun dengan wilayah lainnya sebagai satu kesatuan wilayah metropolitan Kota Bandung; prediksi visi, misi pembangunan kota 2008-2013 (Walikota terpilih); dan penetapan

program prioritas. Perlu ditegaskan bahwa adanya rekonstruksi strategi pembangunan kota yang juga menyerap visi dan misi pembangunan kota 2008-2013 diharapkan terjadinya sebuah sinergitas antara pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan dengan program prioritas Walikota periode tersebut.

Disamping sebagai program yang akan dilaksanakan oleh Walikota periode 2008-2013, sebagai komitmen terhadap konstituennya, Strategi Pembangunan ini juga merupakan arah tujuan bersama dari seluruh *stake holders* Kota Bandung.

4.1. Isu Strategis

Sebagai bagian dari negara Indonesia yang menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) maka perlu ditangkap sejumlah isu yang berpengaruh secara strategis terhadap upaya peningkatan kesejahteraan warganya. Isu strategis diserap dari kegiatan pembangunan yang belum dapat menangani permasalahan pada periode tahun 2004-2008 serta proyeksi permasalahan pada tahun 2009. Isu strategis ini jika tidak segera ditanggulangi diperkirakan mempunyai potensi atau dampak besar terhadap pembangunan Kota baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu-isu yang mengemuka pada periode lalu dan proyeksi dimasa yang akan datang, yaitu :

A. Isu Strategis RPJP 2005-2025, meliputi:

1. Terbatasnya daya dukung dan daya tampung kota
2. Masih rendahnya daya tarik dan daya saing kota
3. Belum tertanganinya masalah sosial kemasyarakatan
4. Masih rendahnya kualitas SDM dan Modal Sosial
5. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas Manajemen Kota

B. Isu Strategis RPJMD Transisi Tahun 2009, meliputi:

1. Pemilu Nasional 2009
2. Pengembangan ekonomi kreatif

3. Percepatan Pengembangan Wilayah Bandung Timur
4. Implementasi Reformasi Birokrasi
5. Pengembangan daya saing kota
6. Pelayanan Infrastruktur dasar

4.2 . Visi dan Misi RPJP Kota Bandung 2005-2025

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 20 tahun mendatang, serta penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka “Visi Daerah” Kota Bandung pada tahun 2025 adalah:

“KOTA BANDUNG BERMARTABAT”

Visi Kota Bandung tersebut dalam artian secara harfiah bermakna Kota yang mempunyai harga diri dapat dibanggakan oleh seluruh warganya dan kota yang mempunyai kehormatan melalui pelayanan prima yang diberikan kepada seluruh warganya tanpa membedakan status. Di Masa yang akan datang Kota Bandung dapat menunjukkan eksistensi masyarakat kotanya untuk dijadikan teladan karena kebersihan, ketertiban, keamanan, kemakmuran, ketaatan, keadilan, dan ketakwaannya.

Kondisi relatif pencapaian visi tersebut pada tahun 2025 selayaknya dapat secara normatif diukur dari berbagai indikator ‘bermartabat’ sebagai berikut:

- Kota Bandung menjadi kota *terbersih* di tingkat nasional;
- Kota Bandung menjadi kota percontohan atas *ketertiban* semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia;
- Kota Bandung menjadi kota yang *teraman* bagi berbagai masyarakat yang tinggal maupun pengunjung untuk berbagai keperluannya;
- Kota Bandung menjadi kota yang *termakmur* di Indonesia (*place prosperity*) dengan masyarakatnya yang sejahtera secara ekonomi maupun sosial (*people prosperity*);

- Kota Bandung menjadi kota percontohan atas **ketaatan** pemerintahan kota, masyarakat, dan swasta pengusahnya pada norma hukum, aturan, etika dan kepatutan budaya dan adat-istiadat perkotaan yang berlaku.
- Kota Bandung menjadi kota yang paling menonjol sisi **keadilannya** bagi semua golongan masyarakat kota dalam hal kesempatan pelaksanaan hak dan kewajibannya berkehidupan dan berpenghidupan.
- Kota Bandung menjadi kota yang masyarakatnya **bertakwa** pada Tuhan Yang Maha Esa.

Berbagai indikator tersebut secara bersama-sama dan saling melengkapi akan mewujudkan harga diri, kehormatan, keadilan, dan harkat kemanusiaan yang membentuk “Kota Bandung Bermartabat”.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan (2005-2025) yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen kota, maka Misi yang akan dilaksanakan beserta arah pembangunan, strategi, dan indikator kinerja 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal (cerdas, sehat, produktif, mandiri, komunikatif, kooperatif, toleran, berdaya saing/kompetitif) dan religius (bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia)
2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing
3. Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, (yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat)

6. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat);

4.3. Strategi Pembangunan Kota

Untuk dapat menjalankan visi dan misi serta menjawab isu-isu strategis, maka perlu ditetapkan program prioritas, sebagai bagian utama dalam strategi pembangunan kota. Sebagai arah pembangunan Kota Bandung, maka ditetapkan tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kota Bandung 2009 adalah:

“PENINGKATAN DAYA SAING KOTA MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MENUJU KOTA BANDUNG BERMARTABAT”

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2009 ditetapkan dengan memperhatikan isu-isu strategis dan ditindallanjuti oleh kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan bersama (common goals) serta didukung oleh kegiatan yang dikelompokkan pada Non Common Goals.

4.3.1 Tujuan Bersama (Common Goals)

Tujuan bersama (common goals) yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, antar tingkatan pemerintah baik pusat, propinsi, kabupaten dan kota tetangga, serta antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Model Sinergitas tersebut memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Tingginya komitmen kebersamaan lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. Perencanaan program/kegiatan terpilih dibuat secara bersama-sama seluruh SKPD yang terlibat berdasarkan target kinerja

sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Kota Bandung Tahapan ke II;

- c. Program dan kegiatan terpilih dilaksanakan dalam rangka optimalisasi input, output, outcome dan target capaian program;
- d. Pelibatan secara aktif lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat serta segenap pelaku pembangunan lain sebagai mitra strategis sejak tahapan perencanaan.

Kriteria Program Pembangunan 2009, antara lain:

- a. Memiliki keterkaitan dan menunjang keberlanjutan Renstra
- b. Mendukung pengembangan Bandung ekonomi kreatif
- c. Mendukung Percepatan Pengembangan Wilayah Bandung Timur
- d. Mendukung Implementasi Reformasi Birokrasi
- e. Mendukung Pengembangan daya saing kota
- f. Mendukung Pelayanan Infrastruktur dasar

Sedangkan kriteria program penunjang, yakni harus memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Tupoksi dan Kewenangan SKPD dalam rangka penanganan Agenda Prioritas tahun 2009.

Adapun tujuan bersama (Common Goals) yang akan dicapai dalam RPJMD Transisi Kota Bandung 2009 adalah :

- 1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM yang Religius;
- 2) Peningkatan IPM Kota Bandung;
- 3) Pengembangan ekonomi kreatif;
- 4) Percepatan Pengembangan Wilayah Bandung Timur
- 5) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- 6) Pengembangan kehidupan sosial budaya
- 7) Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar
- 8) Pengembangan daya saing kota

4.3.2 Prioritas Penunjang

Untuk mewujudkan Tujuan Bersama (Common Goals) diperlukan kegiatan penunjang yang dikelompokkan pada Non Common Goals, yang terdiri dari Program Pendukung yang meliputi kegiatan utama, penunjang dan khusus. Program tersebut diarahkan untuk mendukung kegiatan operasional pada masing-masing SKPD serta mendukung tugas pokok dan fungsi kinerja SKPD.

4.4. Agenda Prioritas

Agenda prioritas Program Pembangunan Kota Bandung tahun 2009, berdasarkan Isu-isu strategis RPJMD Transisi Tahun 2009, meliputi:

1. Pemilu Nasional 2009
 - Penyelenggaraan Pemilu Nasional 2009
2. Pengembangan ekonomi kreatif
 - Pinjaman bank tanpa anggunan (Model Gramine Bank)
 - Peningkatan Indeks Daya Beli
3. Percepatan Pengembangan Wilayah Bandung Timur
 - Pembangunan SOR Gedebage
 - Pembangunan PLTSa
4. Implementasi Reformasi Birokrasi
 - Pengembangan E-Government
 - Penuntasan Reformasi Birokrasi
 - Operasionalisasi Bandung Incorporated (Holding Company)
5. Pengembangan daya saing kota
6. Pelayanan Infrastruktur dasar
 - Penyusunan RTRW & RDTR

- Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota (Banjir, Sampah, Air Bersih, Kemacetan)
- Peningkatan Cakupan Pelayanan Infrastruktur
- Penataan Pasar Tradisional
- Penataan PJU
- Bandung Eco Town
- Pembangunan Asia Africa Village

BAB V

POKOK- POKOK PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA

Dalam implementasi strategi pembangunan kota, maka diperlukan program indikatif Kota Bandung Tahun 2009 sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. Indikatif program ini mengacu kepada program prioritas sebagai upaya dalam penanganan isu-isu strategis RPJMD Transisi dengan meletakkan *common goals* (tujuan bersama) sebagai kerangka kerja.

Prosedur penyusunan program pembangunan kota dapat dideskripsikan dengan melihat isu strategis sebagai sentral permasalahan dalam mengelompokkannya ke dalam kelompok kluster pembangunan. Sedangkan Urusan-urusan Wajib dan Pilihan dalam urusan Pemerintah akan menjadi sub kelompok dari **program indikatif**. Dari kerangka prosedur pemikiran tersebut, akan muncul sebuah arah kebijakan program pembangunan kota. Adapun program indikatif yang telah diidentifikasi, dapat dirinci sebagai berikut:

1. KLUSTER PENDIDIKAN

Nomor Program	Prioritas
1	Pendidikan
	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Program Pendidikan Menengah
	Program Pendidikan Non Formal
	Program Pendidikan Luar Biasa
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2	Pemuda dan Olah Raga
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
	Program Upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

2. KLUSTER KESEHATAN

Nomor Program	Prioritas
1	Kesehatan
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Pengawasan Obat dan Makanan
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	Program Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
2	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	Program Keluarga Berencana
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
	Program Pelayanan Kontrasepsi
	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

3. KLUSTER EKONOMI

Nomor Program	Prioritas
1	Perencanaan Pembangunan
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2	Perdagangan
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
3	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
4	Perindustrian
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
	Program Penataan Struktur Industri
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
5	Pariwisata
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
	Program Pengembangan Kemitraan
6	Penanaman Modal
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
7	Pertanian
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
	Program Peningkatan Produksi
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
8	Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3. KLUSTER EKONOMI

Nomor Program	Prioritas
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
9	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
10	Kelautan dan Perikanan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

4. KLUSTER INFRASTRUKTUR DASAR

Nomor Program	Prioritas
1	Pekerjaan Umum
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	Program Pengendalian Banjir
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
	Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Membangun Bangunan

Nomor Program	Prioritas
2	Perumahan
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Lingkungan Sehat Perumahan
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman
3	Penataan Ruang
	Program Perencanaan Tata Ruang
	Program Pemanfaatan Ruang
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4	Perencanaan Pembangunan
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
	Program Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
	Program Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
5	Perhubungan
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
6	Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi
	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan
	Program Pengendalian Kebakaran Hutan
	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
7	Pertanahan
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
	Program Pengembangan Sistem Informasi

5. KLUSTER PRANATA PEMERINTAHAN

Nomor Program	Prioritas
1	Perencanaan Pembangunan
	Program Pengembangan Data/Informasi
	Program Kerjasama Pembangunan
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan
3	Pemberdayaan Perempuan
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
4	Sosial
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Program Pembinaan Anak Terlantar
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
	Program Pembinaan Panti Asuhan /Jompo
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
5	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
	Program Pendidikan Politik Masyarakat
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
6	Pemerintahan Umum
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Nomor Program	Prioritas
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
	Program Mengintensifkan Penanganan dan Pengaduan Masyarakat
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik
	Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Wilayah
	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
7	Kepegawaian
	Program Pendidikan Kedinasan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
8	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
	Program Peningkatan Peran Perempuan di kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
9	Statistik
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
10	Kearsipan
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi
11	Komunikasi dan Informatika
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi
	Program Kerjasama Informasi dengan Massa Media
12	Transmigrasi
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
	Program Transmigrasi Lokal
	Program Transmigrasi Regional
13	Kebudayaan
	Program Pengembangan Nilai Budaya
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

BAB VI

PENUTUP

1. Posisi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kota Bandung Tahun 2009.

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kota Bandung Tahun 2009 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum berkaitan dengan dokumen perencanaan jangka menengah.

Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kota Bandung Tahun 2009 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2009 dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta sebagai acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

2. Kaidah Pelaksanaan

Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran program, maka dalam pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kota Bandung Tahun 2009 perlu penguatan peran (partisipasi) dan komitmen seluruh *stakeholder*.

Guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka kepada masing-masing pelaku pembangunan diharapkan mengambil peran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pj. WALIKOTA BANDUNG,



DR. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Ir. Drs. H. TAUFIK RACHMAN, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 073 505